



**RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja PD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Tengah Tahun 2023 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran BKD Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2023.

Semarang, November 2022

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Tengah**



Drs. WISNU ZAROH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19630526 199503 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa setiap perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan awal RENJA PD berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat

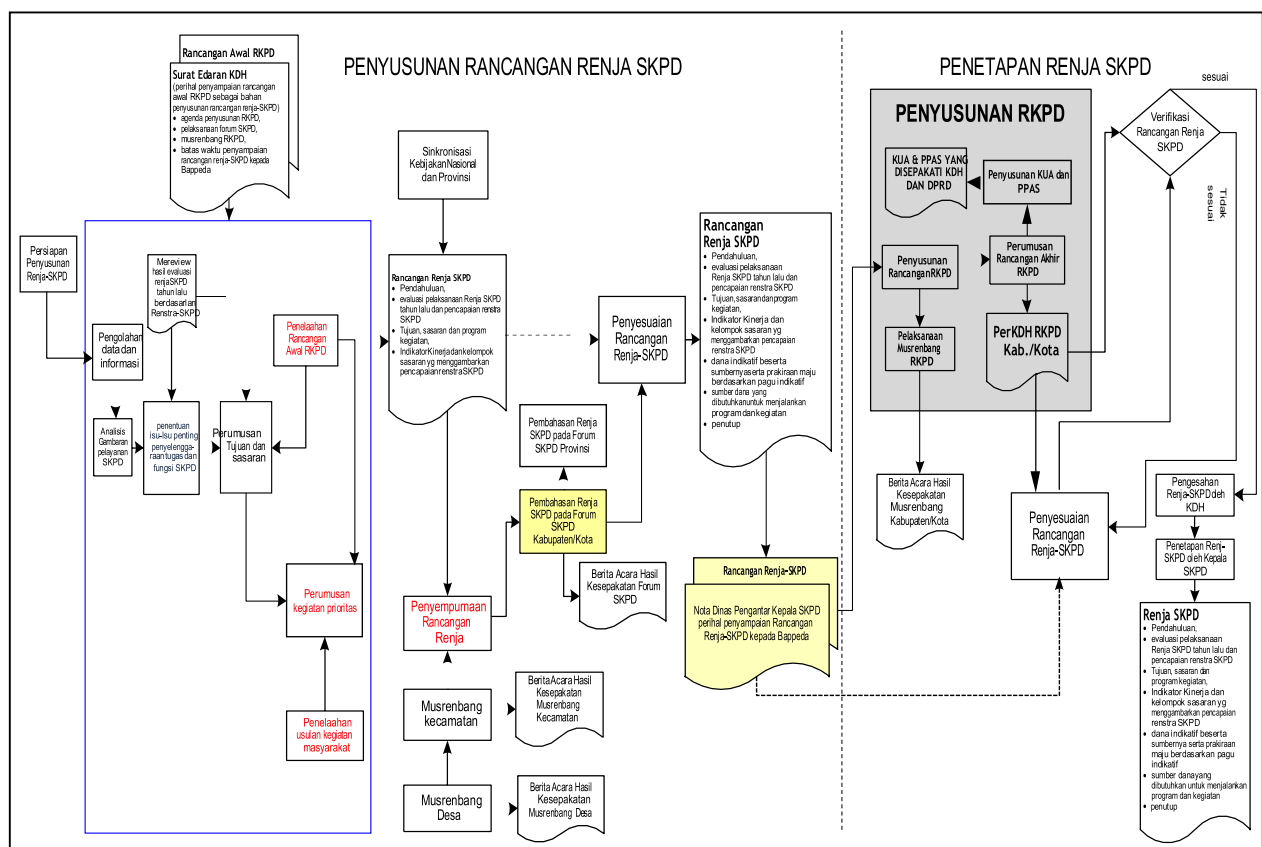
Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Penetapan Rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi disampaikan kepada kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja SKPD sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Keterkaitan Renja SKPD dengan RKPD
berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017



Renja SKPD/Renja Perangkat Daerah (Renja PD) disusun dengan

berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan.

Renja PD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD/RKA- Perangkat Daerah. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DPA, sebagai penjabaran dari APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagai wujud dari proses penganggaran berbasis kinerja (PBK) yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan target capaian kinerja yang diharapkan dan efisiensi dalam pencapaiannya Landasan Hukum.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 merupakan tahun kelima sebagai tahun terakhir dari penjabaran pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yaitu “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari.” Guna mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Daerah tersebut, yaitu dengan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dalam Rencana Pembangunan Daerah diarahkan pada “Perwujudan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik” dengan fokus pada pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja dengan didukung oleh sistem informasi kepegawaian yang cepat dan terintegrasi.

1.2. Landasan hukum

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86– 92) ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

- 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah ;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
25. Permendagri 90 tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 26. Kemendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 104 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
 30. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 32).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Mendasarkan visi dan misi dimaksud, BKD Provinsi Jawa Tengah akan mendukung melalui implementasi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ke-2 yaitu “Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kab/Kota.” melalui program Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja BKD Provinsi Jawa Tengah adalah untuk menjabarkan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun 2021 dan Capaian Renstra BKD
 - 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD Provinsi Jawa Tengah
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKD
 - 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKD Provinsi Jawa Tengah

- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

- BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun 2021 dan Capaian Renstra BKD

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Pada realisasi program/kegiatan terdapat beberapa target yang terpenuhi bahkan melampaui yaitu pada indikator Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas, Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI, Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar, Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui jin belajar, Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Hasil Seleksi Promosi Terbuka, Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikas, rekam jejak jabatani dan Persyaratan Objektif lainnya, Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabase kinerjanya di lingkungan Pemprov Jateng, Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabase kinerjanya di lingkungan Pemprov Jateng, Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan (1 dok/th), Jumlah SK yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan, Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional, Jumlah PAK yang ditetapkan, Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi, Jumlah Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan CPNSD Kab/Kota, Jumlah Penyelesaian SK CPNSD dan SK PNSD, Jumlah OPD yang dievaluasi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan, Rekomendasi hasil evaluasi penempatan pejabat pelaksana sesuai peta jabatan di OPD, Jumlah penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu Pemprov dan Kab/Kota, Jumlah fasilitasi Izin Cuti, Jumlah pembuatan Karis/Karsu, Jumlah pembuatan Karpeg, Jumlah penerbitan SPTKG, Jumlah pelayanan administrasi mutasi PNS, Jumlah pelayanan administrasi pension, Jumlah pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS, Test Mutasi PNS, Jumlah fasilitasi seleksi capra IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah, Jumlah rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS, Jumlah Laporan/aduan kasus kepegawaian, Jumlah Penanganan ijin perceraian PNS, Jumlah PNS yang diberikan Sosialisasi peraturan perundang-undangan, Jumlah konsep peraturan bidang kepegawaian, Jumlah peserta apel siaga KORPRI, Jumlah Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja,

Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang mendapatkan penghargaan SLKS, Jumlah PNS yg mendapatkan pembekalan memasuki masa purna tugas, Jumlah usulan TK SLKS dari pemerintah provinsi dan kab/kota se-jawa tengah, Jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem Simpeg, Jumlah dokumentasi profil kepegawaian, Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian, Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard (menggunakan lactomapfolder), Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara digital, Jumlah pengembangan modul aplikasi atau Bintek dokumentasi data kepegawaian dengan SKPD (Bintek/aplikasi), Jumlah PNS Pemerintah Kab/Kota yang dinilai potensi dan kompetensinya, Jumlah PNS Pemprov Jateng yang dinilai potensi dan kompetensinya, Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang terpetakan kompetensinya, Jumlah telaahan hasil penilaian PNS pemprov Jateng, Penyempurnaan metode penilaian kompetensi, Jumlah ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I.

Dalam situasi pandemi covid-19 yang menjadi bencana nasional non alam di Indonesia menyebabkan adanya pembatasan kegiatan dan refocusing anggaran dan kegiatan untuk penanganan covid-19. Hal ini berpengaruh terhadap ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target dan bahkan tidak dilaksanakan yaitu pada indikator Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas, Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas, Jumlah PNS yang masuk Talent Pool, Jumlah dokumen pengembangan manajemen talenta, Jumlah pelaksanaan Sumpah/Janji PNS, Jumlah pembekalan purna Praja IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah, Jumlah PNS yang diberikan bintek pembinaan disiplin PNS, Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik, Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender, Jumlah bintek pengembangan aplikasi simpeg, Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan, Jumlah rakor integrasi Simpeg dan SAPK, Jumlah Pejabat administrator dan Pengawas Pem Kab/Kota yang dinilai kompetensi manajerialnya, Penyempurnaan metode penilaian kompetensi

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut di atas adalah untuk penyusunan Renstra ke depan akan dilakukan perbaikan penyusunan target indikator program/kegiatan dan pengawalan capaiannya yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran sampai evaluasinya.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Provinsi Jawa Tengah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	03	URUSAN KEPEGAWAIAN					
5	03	02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
		Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui tugas belajar dan ijin belajar	100	40	60	60	100
		Persentase layanan administrasi kepegawaian	100	100	100	100	100
		Persentase penanganan kasus kepegawaian	100	100	100	100	100
		Persentase sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan dan terintegrasi	100	40	44	44	100
		Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya	100	21.5	34	43,20	127,06
		Persentase pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	100	100	100	100	100
		Pengelolaan Data dan Informasi ASN					
		Jumlah dokumentasi profil kepegawaian	60	60	60	60	100
		Jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem Simpeg	5	4	5	8	160

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard (menggunakan lactomapfolder)	1800	1800	1800	1800	100
		Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara digital	352500	352500	352500	352500	100
		Jumlah bintek pengembangan aplikasi simpeg	1	0	1	1	100
		Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan	1	0	1	0	0
		Jumlah rakor integrasi Simpeg dan SAPK	1	0	1	1	100
		Jumlah pengembangan modul aplikasi atau Bintek dokumentasi data kepegawaian dengan SKPD (Bintek/aplikasi)	1	1	1	1	100
		Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian	6	6	6	0	0
	Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan (1 dok/th)	1	1	1	2	200
		Jumlah Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan CPNSD Kab/Kota	1	1	1	2	200
		Jumlah Penyelesaian SK CPNSD dan SK PNSD	150	150	150	331	220,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah fasilitasi seleksi capra IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	3000	4141	3000	2385	79,50
		Jumlah pembekalan purna Praja IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	135	94	125	271	216,80
		Jumlah penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu Pemprov dan Kab/Kota	10000	10997	10000	10857	108,57
		Jumlah pembuatan Karis/Karsu	400	400	400	398	99,50
		Jumlah pembuatan Karpeg	300	300	300	303	101
		Jumlah penerbitan SPTKG	20	25	65	65	100
		Jumlah fasilitasi Izin Cuti	400	400	400	410	102,50
		Jumlah pelaksanaan Sumpah/Janji PNS	750	0	500	1879	375,80
		Jumlah pelayanan administrasi mutasi PNS	200	1200	1000	1000	100
		Test Mutasi PNS	100	150	120	159	132,50
		Jumlah OPD yang dievaluasi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan	49	49	41	41	100
		Jumlah pelayanan administrasi pensiun	2300	2010	2100	2127	101,29
		Jumlah pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS	5	3	3	3	100
	Peningkatan Kapastitas ASN	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabase kinerjanya di lingkungan Pemprov Jateng	940	1638	940	940	100
		Jumlah dokumen pengembangan manajemen talenta	1	1	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas	1	0	1	0	0
		Jumlah ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I	1	1	1	0	0
		Jumlah PAK yang ditetapkan	500	200	400	400	100
		Jumlah SK yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	1850	1050	1850	1850	100
		Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional	250	100	250	1253	501,20
		Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi	2000	2250	4000	4000	100
		Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar	13	13	13	13	100
		Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui ijin belajar	50	50	50	50	100
		Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas	300	618	300	3489	1.163
		Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI	800	902	1250	1499	119,92
		Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik	150	0	150	1569	1.046
		Jumlah peserta apel siaga KORPRI	900	150	900	388	43,11
		Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang terpetakan kompetensinya	2000	426	700	3879	554,14
		Jumlah PNS Pemerintah Kab/Kota yang dinilai potensi dan kompetensinya.	50	50	40	40	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Pejabat administrator dan Pengawas Pem Kab/Kota yang dinilai kompetensi manajerialnya	250	0	180	0	0
		Jumlah PNS Pemprov Jateng yang dinilai potensi dan kompetensinya.	280	346	300	0	0
		Jumlah telaahan hasil penilaian PNS pemprov Jateng	2	1	2	2	100
		Penyempurnaan metode penilaian kompetensi	1	1	1	1	100
	Pengembangan Karir ASN	Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Hasil Seleksi Promosi Terbuka	1	1	9	3	33,33
		Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas	600	0	450	819	182
		Jumlah PNS yang masuk Talent Pool	200	150	200	0	0
		Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikas, rekam jejak jabatani dan Persyaratan Objektif lainnya	160	425	174	607	348,85
	Pembinaan ASN	Jumlah PNS yang diberikan bintek pembinaan disiplin PNS	80	0	84	84	100
		Jumlah PNS yang diberikan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	120	200	105	280	266,67
		Jumlah rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS	60	68	55	86	156,36
		Jumlah Laporan/aduan kasus kepegawaian	30	50	30	31	103,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	
		Jumlah Penanganan ijin perceraian PNS	70	88	55	59	107,27	
		Jumlah PNS yg mendapatkan pembekalan memasuki masa purna tugas.	50	50	50	50	100	
		Jumlah usulan TK SLKS dari pemerintah provinsi dan kab/kota se-jawa tengah	2000	4000	2000	2000	100	
		Jumlah PNS Pem Prov jateng yang mendapatkan penghargaan SLKS	100	100	200	200	100	
		Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender	50	0	50	0	0	
		Jumlah Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja	2	7	2	2	100	
		Jumlah konsep peraturan bidang kepegawaian	1	3	2	2	100	
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
			Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	
			Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	100	100	100	
			Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3	3	3	3	100
			Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	3	3	3	3	100
		Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	17	17	17	17	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Administrasi Umum	Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	12	12	12	100
		Tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	12	12	12	12	100
		Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan	0	0	3	0	0
		Tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12	12	12	12	100
		Terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	12	12	12	12	100
		Terwujudnya jaminan terhadap Barang Milik Daerah kendaraan roda 2	10	10	10	10	100
		Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	1	1	1	1	100
		Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	12	12	12	12	100
		Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	2	2	2	2	100
		Terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah kendaraan roda 4	15	15	15	15	100
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
		Terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12	12	12	12	100
		Terwujudnya pemeliharaan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah	12	12	12	12	100
		Terwujudnya jaminan terhadap barang milik daerah gedung kantor	2	2	2	2	100
		Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	2	6	2	2	100
		Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	12	12	12	12	100
		Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	12	12	12	100
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12	12	12	12	100
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12	12	12	12	100
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	30	30	30	30	100
		Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	200	0	200	0	0

Tabel 2.2
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5 03	URUSAN KEPEGAWAIAN					
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	100	100	100	100
5 03 02 1 02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pejabat struktural yang dilantik dari target yang diusulkan	100	100	100	100
5 03 02 1 02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Hasil Seleksi Promosi Terbuka	1	6	6	100
		Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikas, rekam jejak jabatani dan Persyaratan Objektif lainnya	160	170	170	100
5 03 02 1 03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional	100	100	100	100
5 03 02 1 03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi	2000	2000	2000	100
5 03 02 1 03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah PAK yang ditetapkan	500	500	500	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
										Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional	250	250	250	100
							Jumlah SK yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	1850	1862	1862	100
5	03	02	1	04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang dinilai PKSP	100	100	100	100
5	03	02	1	04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabase kinerjanya di lingkungan Pemprov Jateng	940	768	768	100
							Jumlah PNS yang masuk Talent Pool	200	270	270	100
							Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas	600	678	678	100
5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar	100	80	80	100
5	03	02	1	01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan formasi ASN	100	100	100	100
5	03	02	1	01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan (1 dok/th)	1	1	1	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
										Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Jumlah dokumen pengembangan manajemen talenta	1	1	1	100
5	03	02	1	03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi	100	100	100	100
5	03	02	1	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas	1	1	1	100
							Jumlah ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I	1	1	1	100
							Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas	300	300	300	100
							Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI	800	800	800	100
							Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui ijin belajar	50	50	50	100
							Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar	13	13	13	100
5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase PNS yang terpetakan kompetensinya	100	80	80	80
5	03	02	1	03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase hasil Penilaian Kompetensi PNS yang ditelaah	100	100	100	100
5	03	02	1	03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang terpetakan kompetensinya	2000	5150	5150	100
							Jumlah telaahan hasil penilaian PNS pemprov Jateng	2	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022						
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
		Penyempurnaan metode penilaian kompetensi	1	1	1	100					
5	03	02	1	03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pelaksanaan Uji Kompetensi	100	100	100	100
5	03	02	1	03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Pejabat administrator dan Pengawas Pem Kab/Kota yang dinilai kompetensi manajerialnya	250	225	225	100
							Jumlah PNS Pemerintah Kab/Kota yang dinilai potensi dan kompetensinya.	50	40	40	100
							Jumlah PNS Pemprov Jateng yang dinilai potensi dan kompetensinya.	280	260	260	100
5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	100	100	100	100
5	03	02	1	01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN	90	90	90	90
5	03	02	1	01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah fasilitasi seleksi capra IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	3000	3000	3000	100
							Jumlah pembekalan purna Praja IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	135	135	135	100
							Jumlah Penyelesaian SK CPNSD dan SK PNSD	150	150	150	100
							Jumlah Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan CPNSD Kab/Kota	1	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5 03 02 1 01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase layanan pensiun tepat waktu	100	100	100	100
5 03 02 1 01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah pelayanan administrasi pensiun	2300	2395	2395	100
		Jumlah pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS	5	6	6	100
5 03 02 1 02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu	100	100	100	100
5 03 02 1 02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah fasilitasi Izin Cuti	400	400	400	100
		Jumlah pembuatan Karis/Karsu	400	400	400	100
		Jumlah pembuatan Karpeng	300	300	300	100
		Jumlah penerbitan SPTKG	20	20	20	100
		Jumlah penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu Pemprov dan Kab/Kota	10000	10000	10000	100
		Jumlah PNS yang melaksanakan sumpah janji	750	750	750	100
5 03 02 1 02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pegawai yang diterima dari ajuan mutasi luar Pemprov Jateng	75	75	75	75
5 03 02 1 02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah OPD yang dievaluasi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan	49	49	49	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022						
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
		Jumlah pelayanan administrasi mutasi PNS	200	200	200	100					
		Rekomendasi hasil evaluasi penempatan pejabat pelaksana sesuai peta jabatan di OPD	0	0	0	100					
		Test Mutasi PNS	100	100	100	100					
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase penanganan kasus kepegawaian	100	100	100	100	
5	03	02	1	01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase OPD yang mendapatkan sosialisasi Profesi ASN/Kode Etik	100	100	100	100
5	03	02	1	01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik	150	150	150	100
							Jumlah peserta apel siaga KORPRI	900	900	900	100
5	03	02	1	04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya	100	100	100	100
5	03	02	1	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah konsep peraturan bidang kepegawaian	1	2	2	100
							Jumlah PNS yang diberikan bintek pembinaan disiplin PNS	80	80	80	100
							Jumlah PNS yang diberikan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	120	115	115	100
5	03	02	1	04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan/aduan kasus kepegawaian	30	30	30	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
										Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Jumlah Penanganan ijin perceraian PNS	70	65	65	100
							Jumlah rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS	60	60	60	100
5	03	02	1	04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS	100	100	100	100
5	03	02	1	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender	50	50	50	100
							Jumlah Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja	2	2	2	100
							Jumlah PNS yg mendapatkan pembekalan memasuki masa purna tugas.	50	50	50	100
5	03	02	1	04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS Pem Prov jateng yang mendapatkan penghargaan SLKS	100	100	100	100
							Jumlah usulan TK SLKS dari pemerintah provinsi dan kab/kota se-jawa tengah	2000	2000	2000	100
5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	100	80	80	80
5	03	02	1	01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase dokumen digital kepegawaian yang ditargetkan	100	100	100	100
5	03	02	1	01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara digital	352500	352500	352500	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard (menggunakan lactomafolder)	1800	1800	1800	100
		Jumlah pengembangan modul aplikasi atau Bintek dokumentasi data kepegawaian dengan SKPD (Bintek/aplikasi)	1	1	1	100
5	03 02 1 01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100	100	100	100
5	03 02 1 01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				
		Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan	1	1	1	100
		Jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem Simpeg	5	6	6	100
		Jumlah bintek pengembangan aplikasi simpeg	1	1	1	100
		Jumlah dokumentasi profil kepegawaian	60	60	60	100
		Jumlah rakor integrasi Simpeg dan SAPK	1	1	1	100
		Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian	6	6	6	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
										Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100	100	100	100
X	XX	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	6	6	6	100
X	XX	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3	3	3	100
X	XX	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	100
X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	100	100	100
X	XX	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17	17	17	100
X	XX	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12	12	12	100
X	XX	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	12	12	12	100
X	XX	01	1	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan PD (jenis)	17	17	17	100
X	XX	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	1	1	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
										Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X	XX	01	1	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12	12	12	100
X	XX	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	1	1	100
X	XX	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	200	200	200	100
X	XX	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/Seminar	30	30	30	100
X	XX	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	1	1	1	100
X	XX	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	12	12	100
X	XX	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	12	12	12	100
X	XX	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	12	12	12	100
X	XX	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	12	12	12	100
X	XX	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	12	12	12	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
										Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X	XX	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	12	12	12	100
X	XX	01	1	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	12	12	12	100
X	XX	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12	12	12	100
X	XX	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	1	1	1	100
X	XX	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1	1	100
X	XX	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	0	0	0	100
X	XX	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan meubelair	3	3	3	100
X	XX	01	1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	6	6	6	100
X	XX	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	1	100
X	XX	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	12	12	12	100

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
										Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X	XX	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	12	12	12	100
X	XX	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	12	100
X	XX	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	12	12	12	100
X	XX	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	1	100
X	XX	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	12	12	12	100
X	XX	01	1	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	12	12	12	100
X	XX	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	2	2	2	100
X	XX	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	12	12	12	100

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

Kinerja pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKD Provinsi Jawa Tengah adalah meliputi tugas:

- a. Perencanaan dan pengembangan pegawai;
- b. Mutasi;
- c. Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, dan;
- d. Informasi Kepegawaian;
- e. Penilaian Kompetensi ASN.

Dalam Bidang Perencanaan dan pengembangan pegawai, kinerja ditunjukkan dengan pelayanan terhadap seleksi dan pengiriman peserta diklat, penyusunan data formasi, pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar, pengelolaan dan pengembangan pegawai, ujian kedinasan, penilaian SKP Jabatan Pimpinan Tinggi, seleksi dan pelantikan jabatan struktural, penyiapan bahan seleksi administrasi mutasi jabatan struktural, penyusunan konsep pola karir, mutasi kepegawaian jabatan fungsional tertentu, penyiapan bahan administrasi pengangkatan jabatan fungsional tertentu jenjang utama.

Dalam Bidang Mutasi, kinerja ditunjukkan dengan pelayanan terhadap pelaporan SKP ASN, usulan kenaikan pangkat, pemberian cuti, pengambilan sumpah janji ASN, pengusulan kartu pegawai elektronik, penerbitan kartu istri dan kartu suami, peninjauan masa kerja, penyiapan bahan pengadaan CPNSD dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, penyiapan bahan pengangkatan CPNSD dan PNS, pengkoordinasian dan penempatan siswa IPDN, penyiapan bahan penetapan pindah dan penetapan keputusan pemberhentian PNS, penetapan keputusan bebas tugas PNS yang akan pensiun sesuai batas usia pensiun, keputusan

Dalam Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, kinerja ditunjukkan dengan pelayanan terhadap pengelolaan kesejahteraan pegawai, fasilitasi layanan kesehatan fisik dan mental bagi pegawai, pengelolaan administrasi uji kesehatan PNS, pengelolaan jaminan kesehatan kerja, pengelolaan pemberian penghargaan, pelayanan administrasi BAPETARUM PNS, penyelesaian penegakan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian, penyusunan pedoman pelaksanaan bidang kepegawaian, layanan administrasi kepegawaian sesuai kewenangan daerah, pembinaan dan pengembangan profesi ASN, perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps ASN, pemberian rekomendasi kepada majelis kode etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi, penyelenggaraan usaha peningkatan kesejahteraan anggota.

Dalam Bidang Informasi Kepegawaian, kinerja ditunjukkan dengan pelayanan terhadap pengelolaan sistem informasi kepegawaian, pengelolaan sistem informasi penggajian dan tunjangan kinerja PNS, pengelolaan presensi *online* PNSD, pengawasan proses pemutakhiran data kepegawaian daerah, rekonsiliasi data kepegawaian dengan Badan Kepegawaian Negara.

Kinerja pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan di bidang penilaian kompetensi ASN. Dalam bidang uji kompetensi ditunjukkan dengan penyusunan rencana teknis operasional di bidang perencanaan dan evaluasi dan penilaian kompetensi.

Kinerja pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar			60%	80%	100%	80%	100%	100%	100%	Merupakan jenis indikator program dengan progres positif sehingga program ini akan tercapai pada akhir tahun RPJMD
3	Presentase PNS yang terpetakan kompetensinya			34.00%	80%	100%	43.20%	80%	100%	100%	Jumlah PNS yang dinilai potensi dan kompetensinya melebihi target, pemasangan target yang rendah dikarenakan masih adanya pandemi COVID-19 namun ternyata pandemi mulai menurun sehingga berani untuk menambah jumlah peserta dan merupakan jenis indikator program dengan progres positif sehingga program ini akan tercapai pada akhir tahun RPJMD
4	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Presentase penanganan kasus kepegawaian			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

Tingkat kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tergambar dalam Tabel. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah yang meliputi tugas Perencanaan dan pengembangan pegawai, Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, dan Informasi Kepegawaian, sehingga akan dapat terwujud melalui sinergi program dan kebijakan dalam bidang kepegawaian baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah. Disamping itu, koordinasi dan kerjasama dengan SKPD internal di pemerintah Provinsi Jawa Tengah senantiasa dibangun dan ditingkatkan dalam hal pelayanan kepegawaian. BKD Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepegawaian dalam upaya mendukung peningkatan kinerja pegawai dalam kerangka implementasi sistem merit dalam manajemen ASN. Untuk sasaran dalam Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023 telah selaras dengan misi BKN dalam upaya pengembangan dan optimalisasi pelayanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi dengan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi berbasis IT. Oleh karena itu penguatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam lingkup kepegawaian menjadi penting untuk dilakukan mengingat fungsi fasilitasi provinsi dalam beberapa ruang lingkup pelayanan kepegawaian masih menghadapi kendala dalam implementasinya, antara lain terkait validasi dan update data pegawai serta belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan dengan BKN. Selain itu dalam Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan pendampingan dalam pembuatan dokumen Renstra Kabupaten/Kota yang belum mengakomodasi indikator sistem merit, sehingga menjadi prioritas BKD Provinsi Jawa Tengah untuk membantu memberikan advokasi kepada Kabupaten/Kota untuk penerapan sistem merit.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sumber daya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan

tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah selama dua tahun terakhir selama berjalannya Renstra 2018-2023, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi BKD Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- a. Kebutuhan pemenuhan pegawai untuk mengisi formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi, khususnya untuk formasi jabatan yang terkait langsung dengan pelayanan publik, seiring bertambahnya jumlah pegawai yang pensiun.
- b. Tuntutan peningkatan layanan kepegawaian yang cepat, murah dan mudah seiring perkembangan teknologi mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik.
- c. Masa pandemi Covid-19 berpengaruh pada perubahan sistem kerja ASN.

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Terhadap Pencapaian Nasional/Internasional

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang RPJMD Tahun 2018 – 2023 adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “*Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”.

Upaya mewujudkan visi dimaksud akan dilakukan melalui 4 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperluas kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Mendasarkan visi dan misi dimaksud, BKD Provinsi Jawa Tengah mendukung melalui implementasi, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ke-2 yaitu “Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kab/Kota.” melalui program Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan penyelenggara manajemen ASN dan pengelola kepegawaian daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9).

Adapun tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan kepegawaian ;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian ;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan, dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan, dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan BKD Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dijelaskan bahwa berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan,

standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan dan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian, membentuk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tantangan Pelayanan Kepegawaian :

- a. Belum adanya regulasi pola karier karena secara nasional belum ada acuan;
- b. Belum terlaksananya penilaian kinerja individu yang berkolerasi dengan capaian kinerja organisasi yang digunakan sebagai perhitungan pemberian tambahan penghasilan dengan pertimbangan reward dan punishment yang adil;
- c. Belum terwujudnya sistem remunerasi pegawai berdasarkan kelas jabatan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah;
- d. Masih terdapatnya mismatch dalam penempatan pegawai karena belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan;
- e. Kebutuhan untuk pengembangan kompetensi pegawai dan sarana dan prasarana IT, seiring tuntutan perkembangan global bidang SDM di era revolusi industri 4.0;
- f. Belum sinkronnya database kepegawaian antara SIMPEG dan SAPK;
- g. Kondisi Lingkungan Strategis dan perkembangan Kebijakan menuntut untuk penyesuaian sistem kerja ASN.

Peluang Pelayanan Kepegawaian :

- a. Belum tersusunnya konsep pola karir nasional menjadi peluang inisiasi untuk membuat konsep pola karir daerah menyesuaikan prioritas kebutuhan guna menjaga dan meningkatkan kinerja pegawai;
- b. Rintisan kinerja individu yang berkolerasi dengan capaian kinerja organisasi melalui penyusunan konsep e-kinerja berbasis SKP;
- c. Konsep kelas jabatan sedang disusun bersamaan dengan proses penetapan peta jabatan, sehingga dapat menjadi acuan pemberian remunerasi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- d. Proses penataan pegawai akan lebih terbantu dengan adanya ketentuan PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS, Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa formasi masing-masing satuan organisasi negara disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan norma, standard dan prosedur

yang ditetapkan, dan Memo Dinas Kepala BKN Nomor 01/MD/Ka/IV/2013 tanggal 24 April 2013 yang ditujukan kepada seluruh Kantor Regional, bahwa semua pegawai yang dahulu melamar dengan formasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) hanya akan naik pangkat jika telah diangkat dahulu dalam jabatan JFT sesuai formasi;

- e. Keberadaan Unit Penilaian Kompetensi ASN (UPENKOM) membantu dalam upaya melakukan pemetaan kompetensi pegawai;
- f. Adanya semangat sinergitas pembangunan kepegawaian di lingkungan nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- g. Adanya kegiatan yang mendukung terintegrasinya data SIMPEG dan SAPK;
- h. Penyesuaian sistem kerja sesuai kondisi lingkungan strategis dan perkembangan kebijakan.

2.3.5 Isu Strategis yang Perlu ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, serta hal-hal yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian di Jawa Tengah dalam jangka menengah, maka dapat dihasilkan rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2023 antara lain :

- a. Belum optimalnya implementasi manajemen kepegawaian seiring masih belum adanya beberapa peraturan turunan atas amanah UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan komitmen untuk mengimplementasikan sistem merit;
- b. Konsekuensi meningkatnya jumlah kasus kepegawaian paska pelimpahan kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D);
- c. Kebutuhan sarpras (*hardware/software*) dan infrastruktur IT untuk peningkatan otomatisasi layanan kepegawaian yang cepat, mudah, murah, terintegrasi dan *paperless* sesuai tuntutan dan perkembangan teknologi;
- d. Penyesuaian sistem kerja ASN sesuai kondisi lingkungan strategis dan perkembangan kebijakan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD dilakukan melalui identifikasi program atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Hasil reviu dapat dilihat pada tabel 2.3 dan dapat dianalisis sebagai berikut:

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Kepegawaian Daerah	Semarang	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	100%	2,164,181,000	Program Kepegawaian Daerah	Semarang	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	100%	2,164,181,000	
			Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar	80%	4,174,503,000			Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar	80%	4,174,503,000	
			Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya	80%	1,259,324,000			Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya	80%	1,259,324,000	
			Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	8,897,900,000			Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	8,897,900,000	
			Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	1,474,000,000			Persentase penanganan kasus kepegawaian	100%	1,474,000,000	
			Persentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	80%	1,252,108,000			Persentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	80%	1,252,108,000	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Semarang	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	385,000,000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Semarang	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	385,000,000	
			Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	87,562,249,000			Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100%	87,562,249,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menampung usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai saran masukan dalam peningkatan pelayanan organisasi. Proses usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan disampaikan melalui kanal-kanal informasi BKD Provinsi Jawa Tengah antara lain website: <https://bkd.jatengprov.go.id>., whatsapp: 08112777346, twitter: @bkdjatengprov, email: bkd@jatengprov.go.id dan telpon (024) 8519421, 841581, 8318846. Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh bidang terkait yang menangani substansi usulan/ laporan tersebut.

Usulan yang ditindaklanjuti adalah usulan yang memang menjadi ranah tupoksi BKD Provinsi Jawa Tengah yang secara program/kegiatan merupakan implementasi penyelesaian isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi BKD sesuai tujuan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelaksanaan Analisis Kesenjangan Kompetensi dan Kinerja	Semarang	tersedianya data gap (kesenjangan) kompetensi dan kinerja seluruh PNS	1 Dokumen	Bertujuan untuk menyediakan data gap (kesenjangan) kompetensi dan kinerja seluruh PNS sesuai dengan jenjang dan jenis jabatan yang di duduki
2	Penyusunan Sistem Manajemen Kinerja PNS	Semarang	tersusunnya sistem manajemen kinerja PNS	1 Dokumen	Merupakan proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja; pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi kinerja yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier
3	Penyusunan Sistem Pola Karir	Semarang	tersusunnya sistem pola karir	1 Dokumen	Merupakan pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi serta masa jabatan seseorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun, khususnya disesuaikan pasca kebijakan penyederhanaan birokrasi
4	Pelaksanaan Talent Scouting	Semarang	tersedianya kader talent pool	1 Kegiatan	Penyesuaian dan Penyempurnaan kebijakan Talent Scouting Jabatan Administrator dan Pengawas berdasarkan Manajemen Talenta
5	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	Semarang	terlaksananya pengembangan kompetensi	63 Orang	Proses Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi PNS melalui Pemberian Tugas Belajar.
6	Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT	Semarang	terisinya JPT	1 Kegiatan	Penyesuaian dan Penyempurnaan Pelaksanaan seleksi terbuka JPT melalui seleksi terbuka dan talent pool
7	Pelaksanaan Pemetaan Potensi dan Kompetensi	Semarang	tersedianya profil dan database potensi	2000 Orang	Pelaksanaan Pemetaan PNS dalam kuadran kompetensi, dan tindak lanjutnya.
8	Pengembangan Sistem Informasi Pendukung	Semarang	terintegrasinya sistem informasi kepegawaian	5 Aplikasi	Pengembangan Sistem Informasi untuk mendukung Kebijakan dan Aktivitas Strategis BKD Tahun 2023 dengan mengusung konsep Artificial intelligence(Kecerdasan buatan).

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2023 merupakan tahun ke-5 perencanaan pembangunan jangka menengah Jawa Tengah tahun 2018-2023. Sebagaimana bentuk penjabaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, maka untuk perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Proses dan tahapan penyusunan Renja BKD tahun 2023 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja BKD Tahun 2023 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2021 serta dinamika lingkungan yang terjadi diantaranya dampak sosial, perekonomian, dan kesehatan dari *Coronavirus Disease 2019* (COVID -19) yang oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) dinyatakan sebagai pandemi global. Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 akan fokus pada upaya pertolongan dan pemulihan dampak pandemi Covid -19 terutama pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dengan didukung daya saing sumber daya manusia. Renja BKD Tahun 2023 juga diselaraskan dengan RKP Tahun 2023, RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Road Map Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta menerapkan peraturan perundangan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renja BKD Provinsi Jawa Tengah adalah untuk menjabarkan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja.

3.2.2 Sasaran Renja PD sesuai dengan Tugas, pokok dan Fungsi BKD Provinsi Jawa Tengah

Sasaran Renja PD Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. PNS yang terpetakan kompetensinya (Persentase yang terpetakan 100%)
- b. PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar (Persentase mengikuti TB/IB 100%)
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Yang Terevaluasi Kinerjanya (Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi 100%)
- d. Layanan Administrasi Kepegawaian (Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100%).
- e. Penanganan Kasus Kepegawaian (Persentase penanganan pelanggaran disiplin PNS 100%).
- f. Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan dan terintegrasi (Persentase Aplikasi kepegawaian dikembangkan 100% (25 aplikasi))

Tabel. 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN		Nilai Sistem Merit	Nilai	337 (dalam index 0,82)
		1. Distribusi Penempatan PNS dalam Jabatan	Persentase Distribusi Penempatan PNS Dalam Jabatan	%	100 %
		2. Pelayanan Kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	Persentase Pengembangan Layanan Kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	100 %
2.	Meningkatkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	89
		1. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	89
		2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai	77

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

4.1. Program dan Kegiatan

Rumusan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel. 4.1
Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah									66.317.358.000		72.949.093.800	Badan Kepegawaian Daerah	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	89		89		Badan Kepegawaian Daerah	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah								500.000.000		550.000.000		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	76	500.000.000	76	550.000.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						500.000.000		550.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	500.000.000	100	550.000.000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					500.000.000		550.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	6	500.000.000	6	550.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
		X.XX.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				291.040.000		320.144.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	3	291.040.000	3	320.144.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				208.960.000		229.856.000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	208.960.000	3	229.856.000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah								65.817.358.000		72.399.093.800		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	89	65.817.358.000	89	72.399.093.800	Badan Kepegawaian Daerah	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						65.817.358.000		72.399.093.800		
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	65.717.358.000	100	72.289.093.800	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					58.398.688.000		64.238.556.800		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	17	58.398.688.000	17	64.238.556.800	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				56.867.038.000		62.553.741.800		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	56.867.038.000	12	62.553.741.800	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.471.650.000		1.618.815.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	1.471.650.000	12	1.618.815.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD				60.000.000		66.000.000		
						Jumlah laporan keuangan PD (jenis)	Laporan	17	60.000.000	17	66.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					160.000.000		176.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	160.000.000	1	176.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN	
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				160.000.000		176.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	160.000.000	12	176.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH -- > SEMARANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					300.000.000		330.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	300.000.000	1	330.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	200		200		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				300.000.000		330.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	30	300.000.000	30	330.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH -- > SEMARANG
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.615.280.000		2.876.808.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Dokumen	1	2.615.280.000	1	2.876.808.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.000.000		33.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	30.000.000	12	33.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				527.280.000		580.008.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	12	527.280.000	12	580.008.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				40.000.000		44.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	40.000.000	12	44.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				250.000.000		275.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	250.000.000	12	275.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				300.000.000		330.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	300.000.000	12	330.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan				18.000.000		19.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Perundang-undangan								
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	18.000.000	12	19.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				350.000.000		385.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	350.000.000	12	385.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				800.000.000		880.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	800.000.000	12	880.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				300.000.000		330.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	1	300.000.000	1	330.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					780.000.000		858.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	780.000.000	1	858.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01. 1.07.02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				500.000.000		550.000.000		
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	4	500.000.000	4	550.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01. 1.07.05			Pengadaan Mebel				30.000.000		33.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	3	30.000.000	3	33.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01. 1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250.000.000		275.000.000		
						Jumlah unit Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Unit	6	250.000.000	6	275.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.850.000.000		2.035.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1.850.000.000	1	2.035.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01. 1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60.000.000		66.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	60.000.000	12	66.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				750.000.000		825.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	750.000.000	12	825.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				140.000.000		154.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	140.000.000	12	154.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				900.000.000		990.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	900.000.000	12	990.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.613.390.000		1.774.729.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1	1.613.390.000	1	1.774.729.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAI AN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				350.000.000		385.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	350.000.000	12		385.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel			20.000.000			22.000.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	20.000.000	12		22.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			886.100.000			974.710.000		
					Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	2	886.100.000	2		974.710.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			357.290.000			393.019.000		
					Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana	Bulan	12	357.290.000	12		393.019.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						prasarana pendukung gedung kantor							
						Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100.000.000	100	110.000.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					100.000.000		110.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Bulan	12	100.000.000	12	110.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
		X.XX.01.1.06.08				Fasilitasi Kunjungan Tamu			30.000.000		33.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	30.000.000	12	33.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		X.XX.01.1.06.09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			70.000.000		77.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	70.000.000	12	77.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Terwujudnya penyelenggaraan sistem merit dalam Manajemen ASN									17.176.315.000		18.893.946.500	Badan Kepegawaian Daerah	
						Nilai Sistem Merit	Nilai	340		340	0	Badan Kepegawaian Daerah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Distribusi penempatan PNS dalam jabatan								6.889.640.000		7.578.604.000		
						Persentase distribusi penempatan PNS dalam jabatan	%	100	6.889.640.000	100	7.578.604.000	Badan Kepegawaian Daerah	
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						6.889.640.000		7.578.604.000		
						Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	%	100	2.088.770.000	100	2.297.647.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	
				Mutasi dan Promosi ASN					941.654.000		1.035.819.400		
						Persentase pejabat struktural yang dilantik dari target yang diusulkan	%	100	941.654.000	100	1.035.819.400	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	
		5.03.02.1.02.03			Pengelolaan Promosi ASN				941.654.000		1.035.819.400		
						Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Hasil Seleksi Promosi Terbuka	Orang	1	925.000.000	1	1.017.500.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikas, rekam jejak jabatani dan Persyaratan Objektif lainnya	Orang	160	16.654.000	160	18.319.400	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan Kompetensi ASN					540.916.000		595.007.600		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase PNS yang dilantik dalam Jabatan Fungsional	%	100	540.916.000	100	595.007.600	SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	
		5.03.02.1.03.13			Pembinaan Jabatan Fungsional ASN				70.000.000		77.000.000		
						Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi	Orang	2000	70.000.000	2000	77.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.03.14			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				470.916.000		518.007.600		
						Jumlah PAK yang ditetapkan	Lembar	500	11.435.000	500	12.578.500	SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional	Orang	250	30.000.000	250	33.000.000	SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah SK yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	Sertifikat	1850	429.481.000	1850	472.429.100	SUB BIDANG PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					606.200.000		666.820.000		
						Persentase ASN yang dinilai PKSP	%	100	606.200.000	100	666.820.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	
		5.03.02.1.04.02			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				606.200.000		666.820.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabase kinerjanya di lingkungan Pemprov Jateng	Orang	940	425.000.000	940	467.500.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS yang masuk Talent Pool	Orang	200	6.200.000	200	6.820.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas	Orang	600	175.000.000	600	192.500.000	SUB BIDANG JABATAN STRUKTURAL	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui Tugas Belajar dan Ijin Belajar	%	100	3.781.030.000	100	4.159.133.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					329.470.000		362.417.000		
						Persentase usulan formasi ASN	%	100	329.470.000	100	362.417.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	
		5.03.02.1.01.02			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				329.470.000		362.417.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan (1 dok/th)	Dokumen	1	282.080.000	1	310.288.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumen pengembangan manajemen talenta	Dokumen	1	47.390.000	1	52.129.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Pengembangan Kompetensi ASN					3.451.560.000		3.796.716.000		
						Persentase PNS yang menempuh pendidikan formal dari hasil verifikasi	%	100	3.451.560.000	100	3.796.716.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	
		5.03.02.1.03.04			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				3.451.560.000		3.796.716.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas	Orang	1	60.000.000	1	66.000.000	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I	Orang	1	94.035.000	1	103.438.500	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas	Orang	300	280.381.000	300	308.419.100	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI	Orang	800	138.629.000	800	152.491.900	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan	Orang	50	120.214.000	50	132.235.400	SUB BIDANG FORMASI DAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						melalui ijin belajar						PENGEMBANGAN	
						Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar	Orang	13	2.758.301.000	13	3.034.131.100	SUB BIDANG FORMASI DAN PENGEMBANGAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase PNS yang terpetakan kompetensinya	%	100	1.019.840.000	100	1.121.824.000	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A	
				Pengembangan Kompetensi ASN					1.019.840.000		1.121.824.000		
						Persentase hasil Penilaian Kompetensi PNS yang ditelaah	%	100	459.840.000	100	505.824.000	SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI	
		5.03.02.1.03.02			Pengelolaan Assessment Center				459.840.000		505.824.000		
						Jumlah PNS Pemprov Jateng yang terpetakan kompetensinya	Orang	2000	250.000.000	2000	275.000.000	SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah telaahan hasil penilaian PNS pemprov Jateng	Dokumen	2	45.000.000	2	49.500.000	SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Penyempurnaan metode penilaian kompetensi	Dokumen	1	164.840.000	1	181.324.000	SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pelaksanaan Uji Kompetensi	%	100	560.000.000	100	616.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	
		5.03.02.1.03.02			Pengelolaan Assessment Center				560.000.000		616.000.000		
						Jumlah Pejabat administrator dan Pengawas Pem Kab/Kota yang dinilai kompetensinya manajerialnya	Orang	250	180.000.000	250	198.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENSI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pemerintah Kab/Kota yang	Orang	50	200.000.000	50	220.000.000	SEKSI PENILAIAN	OPD Provinsi ;

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						dinilai potensi dan kompetensinya.						KOMPETENS I	JAWA TENGAH
						Jumlah PNS Pemprov Jateng yang dinilai potensi dan kompetensinya.	Orang	280	180.000.000	280	198.000.000	SEKSI PENILAIAN KOMPETENS I	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi								10.286.675.000		11.315.342.500		
						Persentase pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	100	10.286.675.000	100	11.315.342.500	Badan Kepegawaian Daerah	
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						10.286.675.000		11.315.342.500		
						Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	%	100	7.318.576.000	100	8.050.433.600	Bidang Mutasi	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					6.642.846.000		7.307.130.600		
						Persentase CASN yang lulus seleksi pengadaan ASN	%	90	6.242.846.000	90	6.867.130.600	SUB BIDANG PENGANGKATAN	
		5.03.02.1.01.03			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				6.242.846.000		6.867.130.600		
						Jumlah fasilitasi seleksi capra IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah	Orang	3000	56.880.000	3000	62.568.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pembekalan purna Praja IPDN asal	Orang	135	18.120.000	135	19.932.000	SUB BIDANG PENGANGKATAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						pendaftaran Provinsi Jawa Tengah							
						Jumlah Penyelesaian SK CPNSD dan SK PNSD	Orang	150	145.846.000	150	160.430.600	SUB BIDANG PENGANGKA TAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan CPNSD Kab/Kota	Kegiatan	1	6.022.000.000	1	6.624.200.000	SUB BIDANG PENGANGKA TAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase layanan pensiun tepat waktu	%	100	400.000.000	100	440.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHA N DAN PEMBERHEN TIAN	
		5.03.02. 1.01.06			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				400.000.000		440.000.000		
						Jumlah pelayanan administrasi pensiun	Sertifikat	2300	250.000.000	2300	275.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHA N DAN PEMBERHEN TIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS	Kegiatan	5	150.000.000	5	165.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHA N DAN PEMBERHEN TIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Mutasi dan Promosi ASN					675.730.000		743.303.000		
						Persentase layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu	%	100	498.930.000	100	548.823.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRA SI KEPEGAWAI AN	
		5.03.02. 1.02.02			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				498.930.000		548.823.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah fasilitasi Izin Cuti	Orang	400	13.180.000	400	14.498.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pembuatan Karis/Karsu	Orang	400	18.540.000	400	20.394.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pembuatan Karpeg	Orang	300	15.910.000	300	17.501.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah penerbitan SPTKG	Orang	20	1.260.000	20	1.386.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu Pemprov dan Kab/Kota	Sertifikat	10000	431.200.000	10000	474.320.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS yang melaksanakan sumpah janji	Orang	750	18.840.000	750	20.724.000	SUB BIDANG KENAIKAN PANGKAT DAN LAYANAN ADMINISTRASI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
												SI KEPEGAWAIAN	
						Persentase pegawai yang diterima dari ajuan mutasi luar Pemprov Jateng	%	75	176.800.000	75	194.480.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	
		5.03.02.1.02.01			Pengelolaan Mutasi ASN				176.800.000		194.480.000		
						Jumlah OPD yang dievaluasi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan	OPD	49	50.000.000	49	55.000.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pelayanan administrasi mutasi PNS	Orang	200	89.000.000	200	97.900.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Rekomendasi hasil evaluasi penempatan pejabat pelaksana sesuai peta jabatan di OPD	Dokumen	0		0	0	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Test Mutasi PNS	Orang	100	37.800.000	100	41.580.000	SUB BIDANG PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase penanganan kasus kepegawaian	%	100	1.780.895.000	100	1.958.984.500	Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	
						Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			500.000.000		550.000.000		
						Persentase OPD yang mendapatkan sosialisasi Profesi ASN/Kode Etik	%	100	500.000.000	100	550.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		5.03.02.1.01.08			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN				500.000.000		550.000.000		
						Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik	Orang	150	310.000.000	150	341.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peserta apel siaga KORPRI	Orang	900	190.000.000	900	209.000.000	SUB BIDANG PENGELOLAAN KORPS PROFESI ASN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					1.280.895.000		1.408.984.500		
						Persentase ASN yang dinilai kedisiplinannya	%	100	641.750.000	100	705.925.000	SUB BIDANG PEMBINAAN	
		5.03.02.1.04.07			Pembinaan Disiplin ASN				233.900.000		257.290.000		
						Jumlah konsep peraturan bidang kepegawaian	Dokumen	1	5.400.000	1	5.940.000	SUB BIDANG PEMBINAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS yang diberikan bintek pembinaan disiplin PNS	Orang	80	111.000.000	80	122.100.000	SUB BIDANG PEMBINAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS yang diberikan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	120	117.500.000	120	129.250.000	SUB BIDANG PEMBINAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.08			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				407.850.000		448.635.000		
						Jumlah Laporan/aduan kasus kepegawaian	Kasus	30	70.850.000	30	77.935.000	SUB BIDANG PEMBINAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penanganan ijin perceraian PNS	Berkas	70	67.000.000	70	73.700.000	SUB BIDANG PEMBINAAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi/kla	Kasus	60	270.000.000	60	297.000.000	SUB BIDANG PEMBINAAN	OPD Provinsi ;

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						rifikasi penanganan kasus PNS							JAWA TENGAH
						Persentase PNS yang mendapatkan penghargaan SLKS	%	100	639.145.000	100	703.059.500	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	
		5.03.02.1.04.04			Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai				504.170.000		554.587.000		
						Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender	Orang	50	74.398.000	50	81.837.800	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja	Dokumen	2	209.772.000	2	230.749.200	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah PNS yg mendapatkan pembekalan memasuki masa purna tugas.	Orang	50	220.000.000	50	242.000.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		5.03.02.1.04.05			Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai				134.975.000		148.472.500		
						Jumlah PNS Pem Prov jateng yang mendapatkan penghargaan SLKS	Orang	100	62.110.000	100	68.321.000	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah usulan TK SLKS dari pemerintah provinsi dan kab/kota se-jawa tengah	Berkas	2000	72.865.000	2000	80.151.500	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	%	100	1.187.204.000	100	1.305.924.400	Bidang Informasi Kepegawaian	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					1.187.204.000		1.305.924.400		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase dokumen digital kepegawaian yang ditargetkan	%	100	348.870.000	100	383.757.000	SUB BIDANG DOKUMENTA SI DATA KEPEGAWAI AN	
		5.03.02.1.01.11			Pengelolaan Data Kepegawaian				348.870.000		383.757.000		
						Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara digital	Dokumen	352500	145.194.000	352500	159.713.400	SUB BIDANG DOKUMENTA SI DATA KEPEGAWAI AN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard (menggunakan lactomapfolder)	Buah	1800	152.090.000	1800	167.299.000	SUB BIDANG DOKUMENTA SI DATA KEPEGAWAI AN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pengembangan modul aplikasi atau Bintek dokumentasi data kepegawaian dengan SKPD (Bintek/aplikasi)	Kegiatan	1	51.586.000	1	56.744.600	SUB BIDANG DOKUMENTA SI DATA KEPEGAWAI AN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase OPD yang difasilitasi dan mendapat sosialisasi penerapan Sistem Informasi Kepegawaian	%	100	838.334.000	100	922.167.400	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAI AN	
		5.03.02.1.01.10			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				838.334.000		922.167.400		
						Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan	Buah	1	46.000.000	1	50.600.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAI AN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi	Kali	5	350.000.000	5	385.000.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAI AN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2023		2024			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						dengan sistem Simpeg							
						Jumlah bintek pengembangan aplikasi simpeg	Kegiatan	1	232.380.000	1	255.618.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah dokumentasi profil kepegawaian	Buku	60	6.600.000	60	7.260.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rakor integrasi Simpeg dan SAPK	Kegiatan	1	70.334.000	1	77.367.400	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian	Kegiatan	6	133.020.000	6	146.322.000	SUB BIDANG PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									83.493.673.000		91.843.040.300		

BAB V

PENUTUP

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 merupakan penjabaran RKPD tahun 2023 pada fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian. Penyusunan Rencana Kerja lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis BKD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 dan pagu indikatif yang selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan RKA-BKD Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

Rencana Kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2023, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam bidang kepegawaian khususnya dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan transparan, “tetep mboten korupsi, mboten ngapusi.” Serta melaksanakan program unggulan Gubernur Jawa Tengah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi berbasis kompetensi dan memperkuat sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan, dan terintegrasi. Rencana Kerja Tahun 2023 ini hendaknya tidak dipandang sebagai pemenuhan kewajiban normatif semata, tetapi hal yang terpenting dan menjadi inti permasalahan adalah perubahan paradigma berpikir dan bertindak sesuai dengan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2023.

Karena itu Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 akan dapat terlaksana apabila terdapat komitmen dari seluruh jajaran aparatur di lingkungan BKD Provinsi Jawa Tengah mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.